



Kementerian Sosial RI

Terakreditasi
No 607/AU2/P2MI-LIPI/03/2015

Vol 14 No 4 Desember 2015
ISSN 1412 - 6451

Jurnal

Penelitian Kesejahteraan Sosial

Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak
An Effort to Build Child-friendly City
(Moh Ilham A Hamudy)

Tindakan Kolektif Sosial Istri Nelayan dalam Mengantisipasi Bencana Teknologi
Collective Social Actions of Fisherman's Wife on Anticipating Disaster Technology
(Napsiah)

Efektivitas Peran Pekerja Sosial di Panti Sosial Petirahan Anak
The Effectivity of Social Workers Role at Children Resort Social Institution
(Chatarina Rusmiyati dan Ikawati)

Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Miskin
The Implementation of Social Protection Policy on Health Insurance for the Poor
(Muhtar)

Faktor Determinan dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
The Determinant Factors on Social Rehabilitation of Drug Abuse Victims
(Elly Kuntjorowati)

Organisasi Sosial sebagai Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal
Social Organization as Social Capital in Local Community Empowerment
(Enni Hardiati dan Sri Yuni Murtiwidayanti)

Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor dan Upaya Masyarakat dalam Penanggulangan
Flood and Landslide Natural Disasters and Its People Prevention Effort
(Murdiyanto dan Tri Gutomo)

Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak Mengurangi Tindak Kekerasan
The Role of Family and Community on Reducing Violence against Children
(Ani Mardiyati)

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(B2P3KS)

Jurnal Penelitian
Kesejahteraan Sosial

VOL 14

No 4

Hal 355 - 464

Yogyakarta
Desember 2015

ISSN
1412-6451

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Terakreditasi No 607/AU2/P2MI-LIPI/03/2015
Volume 14 No 4 Desember 2015, ISSN 1412-6451

Terbit empat kali setahun pada bulan Maret, Juni, September dan Desember

Diterbitkan oleh

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta
(SK Kuasa Pengguna Anggaran B2P3KS Yogyakarta Nomor : 06 Tahun 2015)
Keputusan Kepala Bidang Dokumentasi PDII LIPI No.12.360/JI.3.02/SK.ISSN/2001

Visi

Penelitian sebagai landasan ilmiah pembangunan kesejahteraan sosial

Misi

Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial
Apresiasi kerjasama antarlembaga dan komunitas ilmiah
Kontribusi bagi pengembangan ilmu kesejahteraan sosial

Pelindung: Kepala B2P3KS

Penanggung Jawab: Dr. Istiana Hermawati, M.Sos

Mitra Bestari

Prof. Dr.Phil Janianton Damanik, M.Si (Pembangunan Sosial) Universitas Gadjah Mada
Drs. Latiful Khuluq, MA., B.SW., Ph.D (Kesejahteraan Sosial) UIN Sunan Kalijaga
Harmona Daulay, S.Sos., M.Si. (Sosiologi) Universitas Sumatera Utara
Drs. Doddy Sumbodo Singgih, M.Si (Sosial Kemasyarakatan) Universitas Airlangga

Redaksi

Pemimpin Redaksi:

Dr. Gunanto Surjono, S.H., M.Si., (Kebijakan dan Perencanaan Sosial) B2P3KS

Dewan Redaksi:

1. Dr. Soetji Andari, M.Si., (Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat) B2P3KS
2. Dra. Chatarina Rusmiyati, M.Si. (Kebijakan Sosial) B2P3KS
3. Drs. Pranowo (Pengkajian Dampak Sosial dan Evaluasi Program) B2P3KS
4. Dra. Sri Hastuti Susmiati (Pengkajian Dampak Sosial dan Evaluasi Program) B2P3KS
5. Dra. Enni Hardiati (Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat) B2P3KS

Redaktur Pelaksana:

Sugiyarto, S.H.

A. Nururrochman Hidayatulloh, S.Sos.

Jl. Kesejahteraan Sosial 1, Nitipuran, Yogyakarta
Tromol Pos 65 Kode Pos 55002, Telpon (0274) 377265 Fax. (0274) 373530
e-mail: jpksey@yahoo.co.id

Percetakan:

Ash-Shaff

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Volume 14 No 4 Desember 2015
ISSN 1412 - 6451

Daftar Isi

Editorial

1. Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak
An Effort to Build Child-friendly City
Moh Ilham A Hamudy 355 - 368
2. Tindakan Kolektif Sosial Istri Nelayan dalam Mengantisipasi Bencana Teknologi
Collective Social Actions of Fisherman's Wife on Anticipating Disaster Technology
Napsiah 369 - 380
3. Efektivitas Peran Pekerja Sosial di Panti Sosial Petirahan Anak
The Effectivity of Social Workers Role at Children Resort Social Institution
Chatarina Rusmiyati dan Ikawati 381 - 396
4. Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Miskin
The Implementation of Social Protection Policy on Health Insurance for the Poor
Muhtar 397 - 410
5. Faktor Determinan dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
The Determinant Factors on Social Rehabilitation of Drug Abuse Victims
Elly Kuntjorowati 411 - 422
6. Organisasi Sosial sebagai Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal
Social Organization as Social Capital in Local Community Empowerment
Enni Hardiati dan Sri Yuni Murtiwidayanti 423 - 436
7. Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor dan Upaya Masyarakat dalam Penanggulangan
Flood and Landslide Natural Disasters and Its People Prevention Effort
Murdiyanto dan Tri Gutomo 437 - 452
8. Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak Mengurangi Tindak Kekerasan
The Role of Family and Community on Reducing Violence against Children
Ani Mardiyati 453 - 464

**Tindakan Kolektif Sosial Istri Nelayan
dalam Mengantisipasi Bencana Teknologi**
*Collective Social Actions of Fisherman's Wife
on Anticipating Disaster Technology*

Napsiah

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jl. Adi Sucipto No.1 Yogyakarta.
HP +6281369632144. Email: napsiah_2008@yahoo.com.

Diterima 12 November 2015, direvisi 19 November 2015, disetujui 30 November 2015.

Abstract

This research reveals the collective social action done by fishermen's wife to response the existence of Tanjung Adikarto Fishing Port which will launched soon in Karangwuni district, Kulon Progo Regfency. The method used in this research to study the social phenomenon was qualitative. The purposeful sampling was used to determine some informants which were interviewed. Observation was done as to gather secondary data to complement the primary data from informants. The research result showed that the collective social action of the fisherman's wife was to set up the group to accommodate their aspiration and to increase their bargaining position in the society on economic, social, culture and local politic aspects. The social marginalisation by industrialisation of the fishing port can be eliminated due to their bargaining position more stronger.

Keywords: *Collective Social Action; Fisherman's Wife Group; Industrialisation*

Abstrak

Penelitian ini mengungkap tindakan sosial kolektif yang dilakukan oleh istri nelayan dalam rangka merespons pelabuhan penangkapan ikan Tanjung Adikarto yang akan beroperasi di Desa Karangwuni, Kabupaten Kulon Progo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif untuk mempelajari dan memahami fenomena sosial tersebut. Informan dipilih dengan cara pengambilan sampel bertujuan (*purposeful sampling method*) untuk diwawancarai. Observasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder dalam mendukung data primer dari informan yang diwawancarai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan sosial kolektif istri nelayan dengan cara membentuk paguyuban bertujuan untuk menampung aspirasi dan menguatkan posisi mereka di masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik lokal. Penguatan posisi mereka tersebut menyebabkan proses marjinalisasi akibat industrialisasi perikanan dapat diminimalisir.

Kata kunci: **Tindakan Sosial Kolektif; Paguyuban Istri Nelayan; Industrialisasi**

A. Pendahuluan

Pembangunan merupakan hal yang penting dilakukan karena pembangunan dapat memberdayakan masyarakat dengan cara terserapnya tenaga kerja lokal, munculnya aktor-aktor baru yang bergerak dalam bidang ekonomi lokal dan menguatnya ketrampilan-ketrampilan lokal. Dengan berbagai aktivitas tersebut sangat potensial meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar¹. Menurut Fakih (1996), pembangunan adalah suatu cara yang dilakukan untuk menjawab persoalan-persoalan seperti kemiskinan dan

keterbelakangan yang terjadi di dunia ketiga. Namun dalam praktiknya, pembangunan seringkali menjadi "bencana", alih-alih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi terjadi kemiskinan karena pembangunan telah mereduksi keterampilan dan pengetahuan lokal, sehingga berdampak memarjinalkan masyarakat sekitarnya khususnya kaum perempuan (Shiva, 1997; Collier, 1976 dalam Harijani, 2001; Boserup, 1970).

Kasus tentang perempuan termarjinalkan dalam pembangunan terungkap dalam peneli-

tian Maser (1987) yang mengkaji tentang peran perempuan di dunia ketiga. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah persoalan-persoalan Gender dan pembangunan belum berhasil diterjemahkan ke dalam tindakan praktik perencanaan. Bahkan menurut Fakih (1986) *Women in Development Approach* (WID) yang diperkenalkan oleh United States Agency for International Development (USAID) dengan agenda utama adalah melibatkan sumber daya perempuan untuk memberikan sumbangan ekonomi pada pembangunan, namun dalam praktiknya terjadi penyimpangan dari agenda awal karena terjadi penjinakan terhadap perempuan. Dengan demikian *Women in Development Approach* (WID) dianggap gagal dari agenda utamanya karena tidak melibatkan dan memperhitungkan peran perempuan dalam pembangunan.

Merujuk Korten (1984), upaya mengantisipasi berbagai dampak pembangunan diperlukan partisipasi dari warga. Tindakan kolektif yang dimanifestasikan dalam bentuk kelompok-kelompok sosial, asosiasi lokal, dan paguyuban adalah cara warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Tindakan kolektif tersebut mampu menampung aspirasi anggota dan menyuarakan aspirasi warga untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi saat pembangunan tidak berpihak kepada kepentingan warga setempat.

Tindakan kolektif lokal yang dilakukan oleh perempuan telah terbukti dapat meminimalisir dampak negatif dari pembangunan. Studi-studi yang memfokuskan tentang tindakan kolektif lokal perempuan atau yang serupa dalam rangka memperjuangkan kepentingan perempuan sudah banyak dilakukan. Beberapa penelitian yang dapat dirujuk adalah studi-studi yang dilakukan di India seperti, Shiva (1997), Dankelman & Davitson (1988), Bhatt (1989), Subrahmanyeswari *et al* (2007), sintesis penelitian ini adalah tindakan kolektif yang dilakukan oleh perempuan di India dalam rangka menentang pembangunan karena pembangunan mereduksi keterampilan dan pengetahuan lokal perempuan. Di Indone-

sia, tindakan kolektif lokal pernah diteliti Soetipto (2005), Syarif (1996) dan Farida (2012). Penelitian-penelitian tersebut memperjuangkan kepentingan perempuan di bidang politik, ekonomi dan budaya. Sintesis dari penelitian-penelitian itu adalah tindakan kolektif memiliki kontribusi yang besar untuk memperjuangkan berbagai macam isu-isu terkait dengan kualitas hidup para perempuan.

Dari penelitian-penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa tindakan kolektif yang dilakukan oleh para perempuan bertujuan memperjuangkan berbagai isu, baik itu lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan perempuan, yang dimobilisir oleh berbagai kalangan baik dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas atau bahkan pemerintah sendiri. Dengan demikian belum ada yang mengkaji tentang gerakan kolektif lokal yang diinisiasi oleh komunitas itu sendiri khususnya komunitas nelayan. Penelitian ini memfokuskan pada tindakan kolektif lokal perempuan dalam rangka merespons akan beroperasinya pelabuhan ikan Tanjung Adikarto yang merupakan pelabuhan ikan terbesar di sepanjang selat Pulau Jawa², dengan cara membentuk paguyuban diberinama Paguyuban Srikandi.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat bahwa pembangunan seringkali tidak melibatkan warga setempat karena warga tidak memiliki kekuatan secara ekonomi, sosial dan politik lokal sehingga warga termarginal akibat pembangunan khususnya pembangunan industri. Agar tidak terjadi dampak negatif tersebut, maka diperlukan upaya memahami kapasitas masyarakat, seperti yang dilakukan oleh sekelompok istri nelayan di Desa Karangwuni, membentuk tindakan kolektif lokal dengan cara membentuk Paguyuban Srikandi sebelum beroperasinya industri pelabuhan penangkapan ikan Tanjung Adikarto. Dari uraian di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa istri nelayan melakukan tindakan kolektif lokal di lingkungan tempat tinggal mereka sebelum beroperasinya sebuah industri pelabuhan penangkapan ikan?

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan cara *purposeful sampling method* (metode sampling bertujuan) dengan memilih orang dari berbagai simpul yang dinilai mengetahui, terlibat dan menguasai informasi yang berkaitan dengan topik dan masalah penelitian (Patton, 2009). Informan yang dimaksud adalah Camat, kepala desa Karangwuni dan jajarannya, istri nelayan dan juga perempuan yang terlibat aktif di dalam kelompok usaha. Selain wawancara, observasi juga dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi dan rekaman proses. Kedua alat pengumpulan data di atas digunakan secara bersamaan untuk memfasilitasi metode pengamatan partisipasi. Untuk membantu pengumpulan data digunakan catatan observasi dan *tape recorder*.

Proses analisis data kualitatif dimulai dari pengumpulan data, baik terhadap data primer maupun sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang hasilnya dibuatkan transkrip hasil wawancara. Data sekunder yang diperoleh dari laporan kecamatan, kelurahan dan laporan pelaksanaan gerakan kolektif lokal dirangkum menjadi sumber pendukung untuk memperkuat data primer. Analisis data kualitatif mengikuti model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984) yang dikenal dengan model interaksi. Model ini dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data yang sudah teranalisis, dan penarikan kesimpulan. Data dikelompokkan secara sistematis kemudian dilakukan analisis untuk disajikan dalam narasi yang bermakna.

C. Tindakan Sosial Kolektif Perempuan Istri Nelayan

1. Desa Karangwuni Selayang Pandang

Desa Karangwuni adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Wates Kabupaten Kulonprogo dengan posisi di sebelah barat berbatasan dengan Desa Glagah, Kecamatan Temon, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan

Samudra Hindia, dan di sebelah utara berbatasan dengan Desa Sogan, Kecamatan Wates. Jarak Desa Karangwuni dengan kecamatan 10 km, sedangkan jarak dengan ibu kota Yogyakarta adalah 25 km.

Dengan luas wilayah 722,35 hektar, Desa Karangwuni dihuni oleh 768 KK dengan jumlah penduduk 2.960 jiwa, yang terdiri dari 1.498 laki-laki dan 1.462 perempuan. Mereka adalah suku Jawa yang sudah bermukim secara turun menurun di desa tersebut. Sehari-hari mereka menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Ada 20 kepala keluarga yang bekerja sebagai nelayan. Nelayan tersebut bukan penduduk asal Karangwuni, melainkan dari Cilacap, namun sudah bermukim dan menetap di Desa Karangwuni selama kurang lebih 25 tahun.

Di Desa Karangwuni terdapat pasar tradisional yang pedagangnya tidak lain adalah penduduk lokal. Mereka menjual hasil-hasil pertanian seperti sayur mayur dan hasil laut yang diperoleh dari Pantai Glagah. Aktivitas ekonomi di pasar tradisional tersebut dimulai pukul 5 sampai pukul 11 setiap hari. Namun, ada beberapa pedagang membuka kiosnya sampai jam 12 setiap hari. Tidak jauh dari pasar tradisional terdapat toko-toko yang menjual lengkap kebutuhan sehari-hari. Berbeda dengan penjual di kios-kios pasar tradisional, toko selalu dibuka sampai jam 9 malam setiap hari.

Aktivitas perekonomian di Desa Karangwuni didukung oleh infrastruktur berupa jalan beraspal dengan kondisi baik. Jalan-jalan beraspal ini menghubungkan kota-kota di sekitarnya. Sedangkan sarana transportasi umum juga tersedia di desa ini. Tersedianya sarana dan prasarana berupa jalan dan kendaraan umum maka daerah ini mudah diakses oleh pihak luar, terlebih desa ini tidak terlalu jauh dari Pantai Glagah yang tidak pernah sepi dari pengunjung.

Kegiatan sosial keagamaan berjalan dengan baik di Desa Karangwuni. Terdapat sarana keagamaan berupa masjid di lingkungan mereka. Masjid bagi mereka adalah tempat yang suci yang hanya digunakan untuk beribadah seperti

sholat berjemaah, pengajian dan memperingati hari besar agama Islam. Selain itu, warga tidak menggunakan masjid untuk aktivitas lainnya. Kegiatan sosial warga seperti gotong royong masih sangat kental di Desa Karangwuni. Hal ini terlihat pada aktivitas gotong royong yang dilakukan warga secara mingguan dan bulanan. Selain itu, aktivitas sosial lainnya seperti arisan, pertemuan paguyuban dilakukan setiap bulan. Pertemuan paguyuban dan arisan dilaksanakan bersamaan dengan pertemuan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Sehari-hari mereka menggunakan bahasa Jawa. Sementara Bahasa Indonesia digunakan untuk berkomunikasi dalam pertemuan-pertemuan formal seperti pertemuan di desa atau dengan warga yang mengajak mereka berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Namun, tidak jarang mereka menggunakan Bahasa Indonesia dengan sesama mereka, terutama pada anak-anak mereka yang masih usia sekolah. Tindakan tersebut dilakukan agar anak tidak mengalami kesulitan saat berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

2. Paguyuban Srikandi Produk dari Tindakan Sosial Kolektif Lokal

Berawal dari akan beroperasinya pelabuhan pengangkapan ikan Tanjung Adikarto pada awal tahun 2014³, para istri nelayan menyadari berbagai dampak beroperasinya industri tersebut pada kehidupan mereka. Nelayan lokal yang menggunakan kapal kecil akan kalah dengan nelayan yang menggunakan kapal besar. Nelayan yang menggunakan kapal besar akan memperoleh hasil ikan yang secara kuantitas lebih banyak dan secara kualitas akan lebih bagus karena jarak melaut lebih jauh apabila dibandingkan dengan nelayan lokal. Selain itu cuaca seperti, angin, ombak dan badai menjadi ancaman karena cuaca tersebut nelayan tidak menghasilkan ikan, sehingga pendapatan nelayan lokal akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan nelayan yang menggunakan kapal besar. Sehubungan dengan itu, muncul kesadaran kolektif untuk memben-

tuk Paguyuban Srikandi di Desa Karangwuni. Paguyuban tersebut pertama kali diprakarsai oleh seorang wanita yang peduli dengan kegiatan usaha pengolahan ikan di lingkungan tempat tinggalnya. Keinginan untuk membentuk kelompok yang memiliki profesi sama yakni sama-sama istri nelayan sudah lama diangankannya. Namun, keinginan tersebut tampaknya tidak mudah, karena berbagai kesibukan dan tempat tinggal yang berjauhan menjadi kendala teknis saat itu.

Secara perlahan upaya untuk menyatukan istri nelayan dilakukan. Mulai dari memberikan informasi secara tidak langsung seperti menitip pesan dari satu kenalan dengan kenalan lainnya, sampai pada upaya menghubungi melalui media seluler. Upaya-upaya tersebut tampaknya membawa hasil yang positif, satu persatu istri nelayan menyatakan minatnya untuk menjadi anggota kelompok. Pertemuan kelompok pertama kali dilakukan pada tahun 2009 di awal tahun. Dalam pertemuan itu pembahasan difokuskan aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama, termasuk juga kepengurusan paguyuban serta nama dari paguyuban tersebut. Pertemuan tersebut pertama kali dilakukan pada siang hari di perumahan nelayan.

Agenda pertama pada pertemuan tersebut adalah pemberian nama untuk paguyuban. Terdapat beberapa alternatif nama yang diajukan yaitu: Paguyuban Srikandi, Paguyuban Lestari dan Paguyuban Kelompok Mandiri. Upaya memutuskan dari tiga alternatif nama tersebut terkesan sangat lambat, karena anggota cenderung berdiam diri tanpa memberikan hak suara, meskipun mereka mengikuti seluruh rangkaian proses rapat tersebut. Walaupun demikian, suasana rapat semakin mengerucut karena anggota paguyuban memilih nama Srikandi yang berarti perempuan tangguh dan beruntung. Dari nama tersebut diharapkan istri nelayan menjadi laskar perempuan nelayan yang berjuang mempertahankan hidup di tengah-tengah beroperasinya industri kapitalis.

Setelah nama paguyuban diputuskan, maka pembentukan ketua menjadi agenda selanjutnya.

Sosok Ibu Sukatmi adalah sosok yang dibutuhkan dalam paguyuban tersebut. Ibu Sukatmi sudah dikenal oleh warga Karangwuni. Perempuan berusia 39 tahun tersebut, beraktivitas sebagai pedagang ikan di pasar tradisional dekat dengan rumahnya. Kemampuan berkomunikasi dengan banyak orang adalah salah satu menjadi alasan anggota kelompok paguyuban mengangkatnya menjadi ketua.

Bagi Ibu Sukatmi, menjadi ketua dari sebuah perkumpulan merupakan pertama kali. Namun, meskipun sebelumnya dia belum pernah menjadi ketua, bagi Ibu Sukatmi bukan persoalan yang sulit untuk memimpin paguyuban tersebut, karena bagi Ibu Sukatmi proses belajar dilakukan dimana saja dan kapan saja. Karena itu, perempuan yang berhasil menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Tingkat Umum ini, tidak menolak atas ditunjukkan dia sebagai ketua Paguyuban Srikandi.

Pada pertemuan yang sama, dibentuk kepengurusan kelompok seperti bendahara, dan sekretaris dan sebagainya. Struktur kelompok istri nelayan terdiri dari ketua adalah ibu Sukatmi, Ibu Yuli mendapat tugas di sekretaris, sementara Ibu Uli menjadi bendahara. Posisi-posisi kepengurusan paguyuban dengan menggunakan sistem penunjukkan. Sistem tersebut dilakukan mengingat secara kuantitas anggota sebanyak 20 orang. Dari jumlah anggota tersebut belum semua anggota memiliki kemampuan untuk mengelola paguyuban. Hal ini yang kemudian menjadi alasan belum ada pergantian kepengurusan di Paguyuban Srikandi, walaupun upaya Ibu Sukatmi untuk mengkader anggotanya menjadi pengurus di Paguyuban selalu dilakukan, namun sampai ini kepengurusan masih dijalankan oleh pengurus lama.

Atas dasar kepiawaian Ibu Sukatmi yang mengerakkan anggota sebanyak 20 orang, melakukan pertemuan setiap bulan dan melakukan aktivitas produk pengolahan ikan, pemasaran hasil olahan ikan, dan keuangan hasil pengolahan ikan. Selain itu, terdapat juga aktivitas arisan kelompok dan simpan pinjam kelompok.

3. Paguyuban Srikandi Memperkuat Peran Perempuan

Sebelum istri-istri nelayan bergabung dalam Paguyuban Srikandi, mereka bekerja secara mandiri dalam hal pengelolaan hasil tangkapan ikan. Hasil-hasil olahan juga masih hanya sebatas untuk konsumsi sendiri. Namun setelah menjadi anggota paguyuban Srikandi, mereka bersama-sama mengoptimalkan dan mengolah sumber daya yang tersedia di sekitar Pantai Glagah seperti, membuat abon dari berbagai jenis ikan (tenggiri, pari dan mayun). Jenis lain adalah membuat bakso ikan, naget dan krispi. Apabila bahan baku berupa ikan laut tidak ada, maka mereka mengganti bahan dasarnya dengan menggunakan ikan lele yang diolah menjadi abon lele.

Pengetahuan untuk mengolah ikan diperoleh berdasarkan pengalaman pribadi. Meskipun terdapat pembagian tugas dalam mengolah ikan, namun tugas-tugas tersebut berdasarkan kemampuan masing-masing. Ada yang memiliki ketrampilan membuat bumbu masak, ada yang memiliki keterampilan dalam hal pengorengan dan ada juga yang memiliki kemampuan untuk pengemasan serta ada yang memiliki kemampuan dalam hal pemasaran. Pembagian tugas tersebut dilakukan secara spontan dan dikoordinir oleh ketua Paguyuban Srikandi. Ibu Yuli misalnya yang memiliki kemampuan memasarkan karena memiliki warung di Pantai Glagah dan kemampuannya menghitung dengan cepat maka tugas pemasaran menjadi tugas utamanya sebagai anggota dari Paguyuban Srikandi.

Pemasaran hasil pengolahan ikan berupa abon yang telah dikemas dengan plastik kecil yang memiliki berat seperempat, setengah kilo dan satu kilo, dan dihargai dari Rp. 14.000 sampai Rp.29.000 tersebut dijual ke pasar dan warung-warung terdekat bahkan dititipkan ke kios-kios yang ada di Pantai Glagah. Sistem penjualan hasil pengolahan ikan tersebut sangat beragam, ada yang langsung dibayar tunai, ada yang sistem titip yakni akan menerima pembayaran apabila abon yang dititipkan sudah

laku terjual, ada juga yang langsung dibeli oleh pemilik kios namun pembayarannya dilakukan setelah abon terjual.

Selain pengolahan ikan laut, terdapat aktivitas arisan dan simpan pinjam di Paguyuban Srikandi. Dua asosiasi lokal ini sangat membantu keuangan para anggota, terutama bila anggota memerlukan kebutuhan mendesak. Seperti kasus Ibu Ety dan Ibu Yuli yang kesulitan memperoleh dana untuk biaya anak untuk masuk sekolah, karena tidak ada tabungan maka mereka memanfaatkan simpan pinjam yang ada di Paguyuban.

Simpan pinjam yang dilakukan Paguyuban Srikandi ini bukan hanya yang memiliki kepentingan mendesak saja, tetapi bagi anggota yang memerlukan dana untuk usaha. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nuri yang meminjam uang untuk memperbaiki jaring ikan yang rusak. Suaminya tidak ada dana untuk memperbaiki jaring yang rusak, dengan kesepakatan bersama mereka meminjam uang di Paguyuban Srikandi.

4. Paguyuban Srikandi Memperkuat Silaturahmi

Selaku sesama umat muslim, mempererat silaturahmi merupakan kewajiban dari setiap manusia, tanpa terkecuali istri nelayan yang berada di bawah naungan Paguyuban Srikandi. Pertemuan yang dilakukan secara rutin setiap bulan sekali, memiliki keuntungan sosial bagi anggota Paguyuban Srikandi, seperti persoalan pribadi menjadi persoalan bersama bagi warga. Selain itu, budaya silaturahmi menjadi media untuk berbagi informasi baik yang terjadi di anggota kelompok maupun yang terjadi di lingkungan mereka.

Dalam pertemuan itu, kasus yang dialami oleh anggota paguyuban berupa pengalaman pribadi menjadi kasus bersama, seperti kasus Ibu Ety yang telah menikah 5 tahun tetapi belum dikarunia anak.

“...saat pertemuan di paguyuban, kasus saya yang belum diberi *momongan* (anak) menjadi obrolan para ibu. Beberapa saran,

saya peroleh dari mereka, seperti saya harus rajin berobat dengan dokter bukan dengan dukun. Atas saran ibu-ibu, maka saat ini saya rutin mengunjungi dokter puskesmas untuk mengupayakan itu...”

Kasus Ibu Ety menjadi pembahasan di pertemuan paguyuban dan anggota paguyuban memberikan saran seperti berobat ke dokter, memperbanyak makanan yang mengandung vitamin K dan juga menghindari pikiran-pikiran yang mengganggu agar lebih tenang. Saran-saran tersebut menjadi pengalaman berharga bagi Ibu Ety, sebab upaya yang dilakukan oleh Ibu Ety selama ini masih terbatas pada pengobatan yang bersifat tradisonal, demikian juga pengetahuannya terhadap makanan dan pikiran sebelumnya tidak pernah diketahui menjadi faktor pengaruh untuk memperoleh keturunan.

Kasus yang dihadapi oleh Ibu Erna adalah anaknya kesulitan mengkonsumsi ikan, padahal di rumah tangga Ibu Erna ikan adalah menu utama karena itu yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Dari ibu-ibu yang tergabung di paguyubanlah Ibu Erna memiliki ketrampilan mengolah ikan yang disenangi anaknya. Kasus yang dialami oleh Ibu Ety dan Ibu Erna di atas adalah kasus-kasus sulit yang dihadapi keduanya dan menjadi persoalan bersama bagi anggota lainnya, sehingga kebersamaan, persaudaraan, dan rasa saling memiliki antaranggota di paguyuban hal-hal yang dirasa sulit, memperoleh jalan keluar karena masing-masing anggota memberikan saran yang rasional untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pribadi.

5. Paguyuban Srikandi Membebaskan dari Kungkungan Budaya

Ada dua pendekatan untuk mengetahui peran perempuan istri nelayan selaku Suku Jawa, *pertama*, adalah perempuan Jawa sejak dahulu memiliki kuasa dalam bidang sosial dan material, karena mereka membuat keputusan di ranah tersebut. Pendekatan *kedua*, melihat bahwa perempuan Jawa adalah makhluk yang pasif

yang memiliki posisi di ranah domestik yang tidak jauh-jauh dari dapur, sumur dan kasur. Secara kultur istri hanya sebagai pendamping suami yang memiliki tugas sebagai ibu rumah tangga mengurus suami, anak-anak dan juga rumah tangga. Menurut Imam (1993) posisi perempuan berada pada the *second sex* yang juga tercermin di dalam ungkapan verbal yang mengunggulkan kaum laki-laki seperti *swarga nunut neraka katut*, yang memiliki arti bahwa kebahagiaan atau penderitaan isteri hanya tergantung pada suami (budaya-budaya ini sudah mendarah daging sehingga ruang gerak perempuan memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya bila dibandingkan laki-laki (Kusujirti, 1997).

Namun pendekatan kedua ini nampaknya semakin hari semakin memudar dengan berbagai kemajuan masyarakat yang juga disertai masuknya berbagai kemudahan teknologi. Perempuan diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengakses berbagai kesempatan. Hal ini juga berlaku bagi istri nelayan di Karangwuni. Tidak ada larangan laki-laki dan masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada di lingkungan mereka.

Kemampuan mereka untuk membentuk organisasi lokal, merupakan fakta penting untuk menunjukkan bahwa kemampuan yang mereka miliki sudah jauh lebih maju dibandingkan sebelumnya. Mereka terbiasa dalam berbagai aksi-aksi sosial lainnya. Mereka juga memiliki kecakapan dalam hal ketrampilan dalam mengelola rumah tangga dan juga organisasi yang mereka tekuni. Bukan hal yang mudah untuk mengerjakan dua peran tersebut dalam satu waktu yang hampir bersamaan seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yuli:

“....saya sulit membagi waktu apabila ingin ikut berorganisasi seperti ikut aktif di pertemuan di paguyuban, karena saya juga harus berdagang di Pantai Glagah, selain itu saya juga masih mengurus rumah tangga. Karena itu, saya kadang-kadang tidak aktif, sebisa saya...”

Kasus Ibu Yuli tampaknya membutuhkan kecakapan dalam manajemen waktu agar peran mereka dalam rumah tangga dan anggota paguyuban dapat berjalan secara berimbang. Namun selama ini, mereka bisa membagi waktu menjalankan tugas-tugas rumah tangga dan tugas paguyuban. Hal ini terbukti tidak ada kasus-kasus yang berdampak negatif terhadap urusan rumah tangga dan urusan paguyuban tatkala mereka sudah menjadi bagian dari Paguyuban Srikandi.

Sementara budaya diam dan *manut* yang menjadi budaya perempuan Jawa tampaknya semakin memudar. Hal ini terungkap dalam pernyataan mereka tentang “*ora kerjo ora mangan*” (tidak kerja tidak makan). Mereka butuh nuansa lain selain dari kesibukan rumah tangga. Mereka ingin memiliki sebuah komunitas yang dianggap bisa maju dari sebelumnya. Bagi mereka, budaya adalah sesuatu yang harus dipatuhi tetapi bukan juga diikuti, selagi mereka tidak melakukan hal-hal di luar batas kewajaran, mengapa mereka harus patuh dan tunduk terhadap budaya tersebut. Ungkapan itu mengisyaratkan bahwa istri-istri nelayan sudah keluar dari belenggu-belenggu yang menghalangi aktivitas mereka untuk memperkuat eksistensi diri.

Eksistensi diri di sektor publik berawal dari Paguyuban Srikandi. Mereka dilatih untuk berbicara di depan para anggotanya. Walaupun ini memerlukan waktu yang panjang, namun upaya itu dilakukan, seperti yang diungkap oleh ibu Sukatmi yang biasanya selalu memimpin pertemuan, dia meminta setiap ibu mendapat giliran untuk tampil di depan anggota paguyuban. Upaya ini dilakukan untuk mengkader para anggota agar bisa berani berbicara di depan umum.

6. Paguyuban Srikandi Media Belajar Politik

Tujuan dari aksi kolektif di bidang politik dalam penelitian ini dibatasi pada kemampuan mereka untuk menyampaikan kepentingan mereka kepada pihak yang bersangkutan dan kepentingan itu bisa didengar bahkan terealisasi. Aksi yang dilakukan oleh anggota Paguyuban

Srikandi, semula mendatangi pihak-pihak yang terkait dengan pelabuhan yakni pihak Dinas Perikanan dan Kelautan dan juga pihak Pelabuhan Tanjung Adikarto untuk mengkomunikasikan berbagai kebutuhan anggota paguyuban Srikandi.

Dalam pertemuan itu, mereka meminta kepada pihak industri atau dinas perikanan terkait dengan keberadaan kelompok untuk maju diperlukan alat-alat pengolahan ikan dan ketrampilan pengolahan ikan seperti pelatihan, *training* pengolahan ikan untuk diversifikasi usaha.

Sistem menghubungi (*loby system*) yang dilakukan oleh anggota Paguyuban Srikandi pada pihak-pihak yang terkait dengan pelabuhan Tanjung Adikarto, membuahkan hasil. Pada tahun 2012, beberapa fasilitas berupa alat-alat pengolahan ikan sudah diturunkan. Alat-alat yang diberikan terkait dengan usaha pengolahan ikan adalah: dua unit Spinner, Mesin bakso satu, presto dua unit, *auto vaccum sealer* sebanyak satu, *hand sealer* sebanyak satu buah dan *chest freezer* sebanyak 5 buah. Alat-alat tersebut diturunkan langsung kepada kelompok dan diterima oleh ketua disaksikan oleh anggota paguyuban lainnya.

Semula alat-alat tersebut digunakan untuk meningkatkan produksi pengolahan ikan, namun sampai penelitian ini selesai dilakukan, alat-alat tersebut masih terbungkus rapi, karena tidak bisa digunakan. Beberapa kendala yang dihadapi adalah kapasitas mesin-mesin tersebut terlalu besar dan juga memerlukan tegangan listrik yang tinggi, yaitu 1000 volt. Sementara tegangan listrik yang ada di perumahan nelayan hanya 300 volt. Terjadinya kesalahan dalam pemberian fasilitas ini, tidak lain karena tidak melibatkan anggota Paguyuban Srikandi, seolah-olah pihak lain lebih mengetahui kebutuhan Paguyuban Srikandi untuk pembelian alat, sehingga alat tersebut belum berfungsi sampai penelitian ini selesai dilakukan.

Selain itu, mereka mendapatkan undangan pelatihan terkait dengan pengolahan ikan yang di adakan Jakarta, di Kabupaten Kulon Progo,

dan di Yogyakarta. Di Yogyakarta yang mengundang adalah Fakultas Perikanan Universitas Gadjah Mada. Merespons undangan pelatihan tersebut dibuktikan dengan menugaskan salah satu anggota paguyuban, dalam hal ini ketua dari paguyuban yang diutus. Alasan pengutusan ketua tidak lain karena ketua paguyuban memiliki berkomunikasi dengan baik, sehingga setelah mengikuti acara tersebut dapat membagikan pengalamannya kepada anggota yang lain.

Peran dari ibu Sukatmi sebagai pemimpin Paguyuban Srikandi juga berdampak positif untuk memasuki ranah politik lokal di tingkat desa. Akses untuk terpilih sebagai calon tunggal perempuan untuk memimpin Kepala Desa Karangwuni untuk periode selanjutnya⁴. Disamping itu kemampuan Ibu Sukatmi untuk mengkonsolidasi suara para istri nelayan yang tergabung dalam Paguyuban Srikandi untuk menentukan pemimpin desa pada periode berikutnya bersamaan dengan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Karangwuni yang lama.

Keinginan warga untuk mencalonkan Ibu Sukatmi tampaknya direspons positif oleh ibu Sukatmi. Hal ini dapat terungkap dalam wawancara dengan Ibu Sukatmi:

“...saya tidak mungkin menjadi kepala desa karena calonnya disini banyak dan bagus-bagus. Namun apabila warga menghendaki saya maju menjadi calon kepala desa, saya akan maju karena saya sudah dipercaya oleh warga...”

Keberanian Ibu Sukatmi memasuki arena politik di lingkungan tempat tinggalnya menjadi terobosan baru, sebab selama ini di Desa Karangwuni belum ada seorang perempuan menjadi kepala desa dan belum juga ada keberanian seorang perempuan untuk memasuki arena politik lokal. Oleh sebab itu, pengalaman memimpin paguyuban yang jumlah anggotanya kecil menjadi pengalaman menarik bagi perempuan-perempuan yang terlibat di dalam paguyuban untuk memasuki arena-arena publik khususnya di bidang politik lokal.

D. Tindakan Sosial Kolektif Lokal Istri Nelayan Desa Karangwuni.

Pentingnya pengorganisasi di tingkat komunitas sudah menjadi fokus perhatian dari sosiolog Columbia yaitu James S. Coleman (1994), yang mengemukakan teorinya yaitu teori pilihan rasional. Pilihan rasional merupakan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan termasuk untung rugi dan mempertimbangkan yang kapasitas diri yang dimiliki oleh sebuah komunitas tersebut. Pada komunitas nelayan yang membentuk sebuah paguyuban lokal merupakan hal yang penting tatkala industrialisasi di lingkungan tempat tinggal mereka. Hal ini, disebabkan berbagai dampak negatif muncul seperti menghilangkan pendapatan penduduk lokal sebagai nelayan, karena nelayan lokal menggunakan kapal yang kecil.

Dalam konteks ini teori Coleman mampu menjawab terkait dengan adanya pelembagaan lokal dari industri nelayan. Terbentuknya Paguyuban Srikandi atas kesadaran kolektif bahwa proses industrialisasi tersebut akan menimbulkan dampak bagi kualitas kehidupan mereka, karena pendapatan yang mereka peroleh dari suami yang bekerja sebagai nelayan akan kalah saing dengan kapal-kapal yang berteknologi canggih yang daya tangkap ikannya jauh lebih banyak karena mampu melaut lebih jauh sehingga berpengaruh pada perolehan ikan.

Kondisi yang demikian dimaknai sebagai ancaman bagi istri-istri nelayan. Itulah sebabnya studi yang dilakukan oleh Shiva (1997) perempuan-perempuan India menolak dengan keras pembangunan karena potensial mereduksi pengetahuan perempuan lokal. Berbeda dengan kajian Shiva, perempuan istri nelayan tidak menolak akan beroperasinya industri penangkapan ikan tetapi mereka meresponsnya dengan membentuk tindakan kolektif lokal yang dibuat, dibentuk dan dilakukan bersama-sama.

Pengorganisasi lokal ini dinilai sangat efektif mengingat bahwa beberapa kasus pengorganisasian yang berasal dari pemerintah dianggap gagal memberdayakan perempuan karena tidak mampu

menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan lokal, sehingga keberadaan dari organisasi yang di bentuk oleh pemerintah tersebut tidak berkesinambungan. Hal ini akan berbeda dengan pengorganisasian yang muncul dari inisiasi masyarakat dari level bawah. Pengorganisasian ini dinilai lebih efektif dan efisien karena seluruh kegiatan tepat sasaran. Hasil dari temuan ini selaras dengan pendapat Farida (2012), yang mengatakan bahwa organisasi lokal memiliki keuntungan yaitu pemberdayaan perempuan.

Mengacu pada pendapat Coleman (1994), bahwa tindakan kolektif itu rasional apabila dibuat kelembagaan. Hal ini disebabkan karena terbentuknya tindakan kolektif yang berupa kelembagaan mendapatkan keuntungan ekonomi. Oleh sebab itu bila suatu masyarakat melakukan pelembagaan adalah pilihan rasional, karena tindakan tersebut sudah memperhitungkan untung dan rugi serta kapasitas diri untuk menghadapi berbagai dampak yang ditimbulkan.

Penelitian ini menemukan bahwa Paguyuban Srikandi yang dibentuk oleh istri-istri nelayan adalah tindakan yang rasional, karena memperhitungkan berbagai pertimbangan untuk mencapai keuntungan, seperti kemampuan mereka mengelola ikan laut yang bernilai ekonomi. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Choe (2005), yang melakukan penelitian di Korea, bahwa terbentuknya tindakan kolektif yang dilakukan oleh kaum perempuan adalah untuk memperkuat ekonomi dengan cara membuat variasi sumber pendapatan.

Selain bertujuan penguatan di bidang ekonomi, tindakan kolektif lokal yaitu membentuk paguyuban bertujuan untuk penguatan di bidang sosial. Di bidang sosial ini dapat dilihat dengan adanya budaya *silaturahmi*, semua persoalan yang dihadapi secara pribadi, seperti persoalan memperoleh anak, persoalan mengatasi kesulitan konsumsi ikan pada anak adalah kasus-kasus pribadi yang diangkat menjadi kasus bersama di dalam kelompok. Kepedulian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh satu

anggota paguyuban dapat terpecahkan secara bersama-sama dengan cara memberikan sumbang saran dan berbagi pengalaman, dengan mengkomunikasikannya dengan sesama anggota paguyuban. Temuan dari penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewulf, *et al* (2005) yang melihat bahwa berkumpulnya para perempuan maka memiliki energi baru karena saling menguatkan satu dengan lainnya.

Penguatan di bidang budaya adalah tujuan lain dari membentuk tindakan kolektif lokal atau paguyuban Srikandi. Masing-masing anggota berusaha keluar dari belenggu budaya yang hanya mengukuhkan perempuan di ranah domestik. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Tjandraningsih (1997) yang mengatakan bahwa keluarnya perempuan dari belenggu budaya yang mengungkung eksistensi mereka di ruang publik adalah perempuan yang sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah, baik dia bekerja atau juga membentuk organisasi dari pekerjaannya itu. Upaya itu dilakukan untuk menobrak budaya yang membelenggu mereka, karena peran perempuan tidak kalah bila dibandingkan dengan peran laki-laki, sehingga budaya-budaya yang membelenggu perempuan untuk maju semakin hari semakin memudar hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi.

Dengan demikian berorganisasi di tingkat lokal merupakan upaya kaum perempuan keluar dari belenggu budaya yang selama ini mengharuskan perempuan hanya berdiam diri pada ranah-ranah domestik. Sebenarnya pada zaman regim orde baru, organisasi perempuan juga sudah mulai marak muncul, namun sayangnya perempuan yang tampil di organisasi itu hanya memosisikan diri sebagai pendukung suami, bukan atas dasar kemampuan dari perempuan itu sendiri. Menurut Hafidz (1993) apabila perempuan menjadi ketua dari organisasi maka sudah dipastikan suaminya menjabat dalam organisasi tersebut. Itulah sebabnya peran aktif perempuan dalam bidang organisasi masih dibayang-bayangi oleh suami.

Penguatan kapasitas juga terjadi di bidang politik sejak mereka berpartisipasi ke dalam organisasi lokal. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa suara-suara perempuan lebih terdengar dan bahkan dipertimbangan oleh pengambil kebijakan apabila mereka mengatasnamakan paguyuban Srikandi. Berbagai isu-isu yang diperjuangkan telah berhasil seperti, pengembangan usaha, fasilitas usaha, bahkan beberapa pelatihan untuk penguatan kapasitas kelompok. Senada dengan pendapat Soetjipto (2005) yang mengatakan bahwa gerakan “Suara Ibu Peduli” melakukan tindakan kolektif turun ke jalan untuk memperjuangkan harga susu yang dirasa sangat tinggi. Dengan menyuarakan kepentingan perempuan, maka regulasi penurunan harga menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan.

Kemampuan memobilisasi suara adalah kapasitas mereka karena mereka memiliki hak suara untuk menentukan siapa yang menjadi kepala desa berikutnya. Kebulatan suara ini turut menentukan arah kepemimpinan lokal ke depan. Selain itu, kepemimpinan lokal yang selama ini dikendalikan oleh laki-laki, namun setelah mereka memiliki kapasitas memobilisasi suara anggota paguyuban, peran anggota paguyuban diperhitungkan dalam pemilihan kepala desa untuk periode berikutnya.

Mengacu pada pendapat Farida (2012) yang mengkaji tindakan lokal perempuan di lingkungan Jawa Timur yang menemukan bahwa tindakan kolektif di Dusun Dasun yang memproduksi peran perempuan ke arah yang lebih baik, maka pengorganisasian ini ditiru oleh perempuan-perempuan di dusun lainnya yang berada di Lingkungan Jawa timur. Hal ini juga terjadi di Desa Karangwuni yang membentuk Paguyuban Srikandi. Tindakan kolektif memberikan manfaat yang besar pada peningkatan kualitas kehidupan perempuan yang terlibat di dalamnya. Hal ini bisa dilihat dari segi capai-capaian di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik yang diperjuangkan oleh istri nelayan yang tergabung dalam Paguyuban Srikandi.

E. Penutup

Tindakan warga untuk mengantisipasi dampak pembangunan sejak awal adalah tindakan rasional dilakukan mengingat pembangunan seringkali tidak dapat diakses warga sehingga pembangunan potensial memarjinalkan warga sekitar. Upaya untuk mengantisipasi hal tersebut, warga melakukan tindakan kolektif dengan cara membentuk asosiasi lokal dengan tujuan menampung aspirasi yang sekaligus menguatkan posisi mereka secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Dengan kapasitas tersebut, proses pamarjinalan akibat beroperasinya industrialisasi dapat diminimalisir.

Pustaka Acuan

- Bhatt, E. (1989). *The Grind of Work*. Amedabad Self Employed Womens's Assosiation. India: Amedabad.
- Boserup, E. (1970). *Womens Role in Economic Development*. London: Allen and Unwin.
- Choe, C.S. (2004). *Key Factors to Successful Comunity Development: The Korean experience*. Discussion Paper No.39. Institute of Developing Economies.
- Coleman, J. S. (1994). *A Rational Choice Perspective on Economic Sociology*. Hal. 166-180. Dalam: Smelser, Neil J and Richard Swedberg (ed). *The Handbook of Economic Sociology*.
- Collier. dalam Harijani (2001). *Etos Kerja Perempuan Desa*. Yogyakarta: MedPrint Offset.
- Dankelman, J dan Davitson, J. (1988). *Women and Environment in The Thrid World Alliance for The Future*. London :Earthscan Publication.
- Dewulf, A; M, Crps; R, Bouwen; and M, Zhingri. (2005). *How Indegenous Farmer and Univerty Engineer Create Actinable Knowldege for Sustainable Irrigation*. London: Sage Publicationan.
- Fakih, M., (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farida, A. (2012). *Gerakan Sosial Perempuan*. Surabaya: Desertasi, Airlangga.
- Grootaert, C. (2001). *Does Social Capital help to Poor? A Synthesof Findings from the Local Level Institutions Studies in Bolivia, Burkina Faso and Indonesia*. The Word Bank: Social Development Familiy Environmentally and Socially Sustainable Development Network. Local Institutions working Paper No. 10.
- Hafidz, W. (1993). *Gerakan Perempuan Dulu, Sekarang dan Sumbangannya pada Transformasi Sosial*, dalam Fauzie Ridjal, Lusi Margiani, Agus Fahri Husein (editor). *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Harijani, (1993). *Etos Kerja Perempuan Desa. Realisasi Kemandirian dan Produktivitas Ekonomi*. Yogyakarta: Philosopy Press.
- Imam, A. (1993). *Perempuan dalam Kebudayaan*. dalam Fauzie Ridjal, Lusi Margiani, Agus Fahri Husein (editor). *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Korten C.D. (1984). *People Centered Development*. David and Klauss (edited) USA: Kumarian Press.
- Kusujarti, S. (1997). "Antara Ideologi dan Transkrip Tersembunyi: Dinamika Hubungan Gender dalam Masyarakat Jawa" dalam Irwan Abdullah (editor). *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maser, C.ON. (1987). *Human Settelements and Housing*. London: Tavistock.
- Miles, M.B and A.M. Huberman. (1984). "Data Management and Analysis Method" dalam Denzin and Lincoln (edited). *Hand Book of Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Patton, M.Q. (2009). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Budi Puspo Priyadi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shiva, V. (1997). *Bebas dari Pembangunan: Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*. Penerjemah Hira Jhamtani. Jakarta: Yayasan Obor.
- Soetjipto, A. W. (2005). *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Buku Kompas.
- Subhilhar. (2008). *Etika Pembangunan: Kajian Alternatif dalam Studi Pembangunan*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar tetap dalam bidang Ilmu Studi Pembangunan pada FISIP USU. Medan.
- Subrahmanyeswari, B.; K. V. Reddy; and B.S. Rao. (2007). *Entrepreneurial behavior of rural women farmers in dairying: a multidimensional analysis*. Livestock Research for Rural Development.
- Syarif, H. (1997). *Pemberdayaan Sumber daya Wanita melalui Pengembangan Agribisnis di Pedesaan*. Bogor: Peragi.
- Syarif, H., (1997). *Pemberdayaan Sumber Daya Wanita melalui Pengembangan Agribisnis di Pedesaan*. Bogor: Persagi.
- Tjandraningsih, I. (1997). *Buruh Perempuan Menguak Mitos*, dalam Irwan Abdullah (editor). *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Endnotes

¹ Subhilhar, Etika Pembangunan: Kajian Alternatif dalam Studi Pembangunan. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar tetap dalam bidang Ilmu Studi Pembangunan pada FISIP USU. Medan, 2008.

² Sampai penelitian ini dilakukukan, pelabuhan ikan tersebut masih dalam proses penyempurnaan, sehingga pelabuhan ikan tersebut belum beroperasi.

³ Semula direncana akan beroperasi di tahun 2013, namun ada kendala teknis sehingga mega proyek ini diperkirakan akan beroperasi pada tahun 2014.

⁴ Untuk dicalonkan sebagai kepala desa, ini belum terbukti, karena sampai penelitian ini selesai dilakukan ibu Sukatmi belum mendaftar sebagai calon kapala desa, namun ada keinginan dari anggota paguyuban untuk mengajukannya.